

BAB III

SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2022

A. Sejarah terbentuknya SEMA No. 1 Tahun 2022

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 (SEMA No. 1) tahun ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2022. Tujuan dari SEMA ini adalah untuk memastikan bahwa Mahkamah Agung terus menerapkan hukum secara konsisten dan terpadu. Untuk itu, Rapat Pleno Kamar berfungsi sebagai alat bantu. Oleh karena itu, kamar-kamar di Mahkamah Agung telah secara rutin menyelenggarakan Rapat Pleno Kamar sejak tahun 2012 untuk membahas berbagai masalah yudisial, baik yang bersifat teknis maupun yang tidak.

Proses penciptaan SEMA No. 1 Tahun 2022 dimulai dengan identifikasi masalah-masalah umum yang muncul dalam pelaksanaan tugas-tugas peradilan, terutama yang terkait dengan administrasi perkara dan prosedur hukum yang berlaku. Mahkamah Agung menyadari perlunya pembaruan dan penyesuaian dalam berbagai aspek operasional pengadilan untuk menghadapi tantangan zaman. Ini melibatkan konsultasi dengan berbagai pihak, termasuk hakim, akademisi, dan praktisi hukum, untuk mendapatkan masukan yang komprehensif berdasarkan praktik lapangan.

Langkah berikutnya melibatkan pembentukan tim khusus oleh Mahkamah Agung yang bertugas merumuskan rancangan SEMA. Tim ini terdiri dari para ahli hukum dengan pemahaman mendalam tentang sistem peradilan dan kebutuhan reformasinya. Mereka melakukan serangkaian pertemuan dan diskusi untuk

menyusun regulasi yang tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Rancangan SEMA kemudian melalui proses uji publik dan menerima masukan dari berbagai pihak sebelum ditetapkan sebagai regulasi resmi.

Penerbitan SEMA No. 1 Tahun 2022 juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan modernisasi administrasi peradilan. Mahkamah Agung melihat kesempatan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dengan memanfaatkan teknologi digital dalam proses peradilan. Oleh karena itu, fokus utama dalam SEMA ini adalah mendorong digitalisasi administrasi perkara dan memperkenalkan prosedur-prosedur baru yang lebih efisien dan mudah diakses oleh semua pihak yang terlibat dalam proses hukum.¹

Ide dari SEMA ini berasal dari putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 berlaku untuk perkara perceraian dan surat permohonan dari suami untuk menceraikan istri Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 di Pengadilan Agama terus mengalami peningkatan dengan alasan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Sehingga SEMA Nomor 3 Tahun 1981 mengingatkan kepada hakim yang memutus perkara perceraian agar memperhatikan hal-hal yang diuraikan dalam ketentuan di bawah ini:

¹ Rapat Pleno Mahkamah Agung Dalam Penetapan SEMA Nomor 1 Tahun 2022, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2022) 5 Desember 2022

1. Persidangan di muka sidang dilakukan terlalu *summir*, tanpa Nampak adanya usaha yang sungguh-sungguh untuk memperoleh gambaran mengenai kebenaran dan motif yang menjadi latar belakangnya;
2. Identitas pihak yang bertanggung jawab atas perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus tidak ditentukan, yang merupakan faktor penting bagi hakim untuk memeriksa ketika mengambil keputusan, terutama karena pihak yang bersangkutan tidak dapat secara sah mengajukan perceraian menurut pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975;
3. Tidak seorang pun dari keluarga dekat pasangan atau rekan dekat lainnya diberikan suara, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
4. Jarang sekali Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Provinsi mengatasi kekurangan yang disebutkan dalam paragraf 1, 2, dan 3 dengan melakukan pemeriksaan tambahan;
5. Sebagai akibat dari kekurangan-kekurangan tersebut, Mahkamah Agung harus mengembalikan berkas perkara untuk mengatasi masalah-masalah ini; hal ini pasti akan memperpanjang waktu yang dibutuhkan untuk memutus perkara di tingkat kasasi, yang berarti bahwa kasus-kasus perceraian tidak akan terselesaikan secepat yang seharusnya.²

Rumusan Rapat Kamar Agama dalam SEMA 1 Tahun 2022 kemudian menegaskan bahwa perkara perceraian dengan alasan pertengkaran yang terus

² Rapat Pleno Mahkamah Agung...

menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan. Kemunculan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut lahir dengan beberapa pertimbangan:

1. Banyaknya perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama bukan dengan tujuan pemutusan ikatan perkawinan melainkan untuk menggertak pasangan.
2. Menepis anggapan Pengadilan Agama sebagai lembaga legalisasi penerbitan akta cerai belaka.
3. mempraktikkan gagasan hukum perkawinan yang mempersulit perceraian.
4. Penilaian awal terlalu sepintas lalu, gagal untuk melakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk memahami niat pemohon yang sebenarnya dengan hanya berfokus pada tujuan yang dinyatakan dalam permohonan.
5. Batasan waktu seharusnya akan sangat membantu bagi para hakim jika ada batasan waktu yang diuraikan dalam sebuah peraturan sehingga mereka dapat mematuhi ketika menyidangkan kasus di pengadilan.³

Dengan diresmikannya SEMA No. 1 Tahun 2022, Mahkamah Agung berharap dapat menciptakan sistem peradilan yang lebih modern, transparan, dan akuntabel. SEMA ini diharapkan dapat mengurangi beban administrasi,

³Amran Suadi, *Impelementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Hasil Rapat Pleno Kamar dalam Putusan yang diajukan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Bimbingan Tekhnis Peningkatan Kompetensi Tenaga Tekhnis Peradilan Agama, 2023), h. 7

mempercepat penyelesaian perkara, dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

B. Kedudukan SEMA No. 1 Tahun 2022

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 (SEMA No. 1 Tahun 2022) memiliki kedudukan penting dalam sistem peradilan di Indonesia. Sebagai bagian dari instrumen hukum, SEMA ini dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dengan tujuan untuk memastikan keseragaman dan konsistensi dalam penerapan hukum di seluruh tingkatan peradilan. SEMA No. 1 Tahun 2022 memberikan pedoman yang jelas bagi para hakim dalam menangani kasus-kasus tertentu, sehingga dapat mengurangi perbedaan interpretasi hukum yang mungkin terjadi. Hal ini sangat penting untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.⁴

Dalam konteks SEMA No. 1 Tahun 2022, Rapat Pleno Kamar di Mahkamah Agung memiliki peran penting. Rapat ini digunakan untuk membahas dan merumuskan berbagai permasalahan teknis dan non-teknis yang dihadapi dalam praktek yudisial. Keputusan yang dihasilkan dari Rapat Pleno Kamar kemudian menjadi dasar penyusunan SEMA, memastikan bahwa edaran tersebut didasarkan pada diskusi dan analisis mendalam oleh para hakim agung. Hal ini memperkuat legitimasi dan otoritas SEMA sebagai panduan yudisial.

Dari segi praktis, SEMA No. 1 Tahun 2022 memberikan kejelasan dan arahan yang sangat diperlukan oleh para hakim dalam menjalankan tugas mereka.

⁴ Adi Cahyadi, Irwan, Tunggul Anshari, and Dhia Al Uyun. “*Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Indonesia*.” (Universitas Brawijaya, 2014). h. 65

Dengan panduan yang lebih terstruktur, hakim dapat mengurangi kebingungan dan meningkatkan konsistensi dalam memutus perkara. SEMA ini membantu para hakim memahami bagaimana menerapkan prinsip-prinsip hukum dalam konteks kasus yang berbeda-beda, sehingga mengurangi kemungkinan adanya putusan yang tidak seragam.

Secara normatif, SEMA No. 1 Tahun 2022 menguatkan wewenang Mahkamah Agung dalam memberikan interpretasi hukum yang mengikat. Surat edaran ini menunjukkan komitmen Mahkamah Agung untuk memelihara integritas dan profesionalisme dalam sistem peradilan. Dengan SEMA ini, Mahkamah Agung menegaskan perannya sebagai penjaga utama konsistensi dan kesatuan hukum di Indonesia. Hal ini juga mencerminkan usaha Mahkamah Agung untuk terus meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam proses peradilan.

SEMA No. 1 Tahun 2022 adalah instrumen kunci dalam sistem peradilan Indonesia. Berlandaskan hukum yang kuat dan tujuan yang jelas, surat edaran ini berfungsi untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan meningkatkan konsistensi putusan pengadilan. Melalui pengawasan dan pengarahan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, SEMA ini membantu memastikan bahwa keadilan diterapkan secara merata di seluruh Indonesia. Implikasi praktis dan normatif dari SEMA ini menunjukkan betapa pentingnya edaran ini dalam menjaga integritas dan profesionalisme dalam sistem peradilan.⁵

⁵ Andhika Santoso, Raihan, Elan Jaelani, and Utang Rosidin. "Kedudukan Dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Indonesia." *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* Vol. 1, no. No. 4 (2023), h. 7–8.

C. Isi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022

Sebelum mengulas lebih lanjut isi dari SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, peneliti ingin menegaskan bahwa fokus penelitian ini adalah pada Rumusan Pleno Kamar Agama bagian Hukum Perkawinan pada upaya dalam mempertahankan suatu perkawinan. Adapun isi dari Rumusan Hukum Kamar Agama bagian Hukum Perkawinan dalam SEMA ini, adalah sebagai berikut:

C. Rumusan Hukum Kamar Agama

1. Hukum Perkawinan

b. Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:

1) Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau

2) Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri

berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.⁶

D. Sebab Akibat Adanya SEMA No. 1 Tahun 2022

Hadirnya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 yang telah diterbitkan tentunya memiliki sebab akibat mengenai permasalahan mendasar dalam sistem peradilan di Indonesia.

1. Penyebab Diterbitkannya SEMA No. 1 Tahun 2022

Terdapat beberapa faktor utama yang mendorong penerbitan SEMA ini antara lain:

- a. Sebelum adanya SEMA No. 1 Tahun 2022, terdapat banyak kasus di mana putusan pengadilan pada tingkat yang sama atau berbeda memiliki hasil yang tidak konsisten untuk kasus yang serupa. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat dan para pencari keadilan. Dengan adanya SEMA No. 1 Tahun 2022, Mahkamah Agung telah berupaya untuk memperkuat otoritasnya dalam memberikan interpretasi hukum yang mengikat dan menjaga integritas serta profesionalisme dalam sistem peradilan.
- b. Kebutuhan akan standar hukum yang seragam menjadi sangat penting dalam sistem peradilan yang semakin kompleks. Dengan adanya berbagai perkara yang ditangani oleh pengadilan, diperlukan standar hukum yang seragam untuk memastikan bahwa putusan yang

⁶ Mahkamah Agung RI, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

dihasilkan berdasarkan interpretasi hukum yang sama. Standar hukum yang seragam ini dapat memastikan kepastian hukum dan meminimalkan kemungkinan kesalahan dalam pengambilan keputusan oleh pengadilan. Oleh karena itu, standar hukum yang seragam harus diprioritaskan dalam sistem peradilan untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat.

- c. Pengawasan dan pembinaan teknis yudisial adalah salah satu tugas utama Mahkamah Agung, yang melibatkan pengawasan dan memberikan arahan kepada seluruh pengadilan di bawahnya. Dengan adanya SEMA No. 1 Tahun 2022, diharapkan bahwa pengawasan dan pembinaan ini dapat dilakukan dengan lebih efektif, sehingga dapat meningkatkan kualitas pengadilan dan memastikan kepastian hukum dalam masyarakat. Pengawasan dan pembinaan teknis yudisial memainkan peran penting dalam memastikan keadilan dan kepastian hukum, serta meningkatkan kualitas pelayanan peradilan di Indonesia.

2. Akibat Diterbitkannya SEMA No. 1 Tahun 2022

Setelah SEMA No. 1 Tahun 2022 diterbitkan, terdapat beberapa akibat yang berdampak dalam sistem peradilan Indonesia, baik dari sisi positif maupun tantangan yang muncul:

- a. Kesatuan penerapan hukum adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam sistem peradilan. Dengan adanya SEMA, diharapkan putusan pengadilan menjadi lebih konsisten, sehingga keadilan dapat ditegakkan dengan cara yang lebih merata. Keseragaman dalam

penerapan hukum juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

Pada beberapa kasus, hakim mungkin merasa terbatas oleh pedoman yang ada dalam SEMA, yang dapat mengurangi fleksibilitas dalam menginterpretasikan hukum sesuai dengan konteks spesifik dari suatu perkara. Oleh karena itu, perlu dilakukan keseimbangan antara keseragaman dan fleksibilitas dalam penerapan hukum agar sistem peradilan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

- b. Peran Rapat Pleno Kamar dalam sistem peradilan sangat penting. Rapat Pleno Kamar yang secara rutin diadakan menjadi forum penting untuk membahas permasalahan teknis dan non-teknis yudisial yang muncul. Hal ini memungkinkan adanya diskusi dan pertukaran pandangan antar hakim, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas putusan pengadilan.

Namun, menjaga agar semua hakim memiliki pemahaman yang sama terhadap hasil Rapat Pleno Kamar dan memastikan implementasi yang konsisten di seluruh pengadilan merupakan tantangan tersendiri. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya yang lebih baik dalam mengkomunikasikan hasil Rapat Pleno Kamar dan memastikan implementasi yang konsisten agar sistem peradilan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

- c. Peningkatan profesionalisme dan integritas dalam sistem peradilan adalah salah satu tujuan yang sangat penting. SEMA ini mendorong

hakim untuk lebih berhati-hati dalam membuat putusan, karena setiap keputusan mereka akan lebih mudah diawasi dan dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Hal ini juga mendorong peningkatan profesionalisme dan integritas dalam sistem peradilan.

Di sisi lain tekanan untuk selalu mengikuti pedoman SEMA mungkin dapat menyebabkan stress tambahan bagi hakim, terutama jika mereka merasa bahwa situasi tertentu memerlukan penafsiran hukum yang berbeda dari yang diatur dalam edaran. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya yang lebih baik dalam mengkomunikasikan tujuan dan sifat SEMA, serta memberikan dukungan psikologis bagi hakim agar mereka dapat bekerja dengan lebih efektif dan efisien.

- d. Efisiensi dalam proses peradilan adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam sistem peradilan. Dengan adanya standar yang jelas, proses peradilan dapat berjalan dengan lebih efisien. Hakim dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan memiliki panduan yang jelas dalam membuat dan menilai putusan, sehingga mengurangi kemungkinan adanya perbedaan interpretasi yang signifikan. Oleh karena itu, standar yang jelas dan konsisten dalam SEMA sangat penting dalam meningkatkan efisiensi proses peradilan dan memastikan keadilan bagi masyarakat.⁷

Dapat dikatakan bahwa SEMA No. 1 Tahun 2022 memiliki peran penting dalam memperkuat kesatuan penerapan hukum dan konsistensi

⁷ Andhika Santoso, Raihan, Elan Jaelani, and Utang Rosidin..., h. 18-20.

putusan pengadilan di Indonesia. Walaupun terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, manfaat jangka panjang dari surat edaran ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme, integritas, serta kepercayaan publik terhadap sistem peradilan Indonesia.